

MODEL KURIKULUM INKLUSIF DALAM MEMBANGUN LINGKUNGAN BELAJAR RAMAH ANAK

Siti Muzayinah^{1*}, Nurfuadi²

^{1,2}UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Indonesia

E-mail: sitimuzayyah7@gmail.com^{1*}, nurfuadi@uinsaizu.ac.id²

Article Info

Received	Accepted	Published
30 Juni 2025	5 November 2025	30 November 2025

Keywords:

Inclusive curriculum
Child friendly schools
Special needs education
Curriculum inclusive model

ABSTRACT

Inclusive education is a global concern aimed at ensuring equal educational access for all children, including those with special needs. In Indonesia, the implementation still faces obstacles, especially related to access, public stigma, and limited support facilities. This study explores the inclusive curriculum model in creating a child-friendly learning environment. Using a descriptive qualitative approach, the research involves literature review and observation of real phenomena regarding inclusive education. Data were analyzed through content analysis to formulate an inclusive school curriculum. The findings reveal that curriculum planning must be based on individual assessments, supported by collaborative teaching involving special education teachers. Inclusive learning is implemented through curriculum modifications, individual learning programs, and appropriate evaluations. The research highlights the importance of teacher competence, parental support, and adequate facilities. In conclusion, the inclusive curriculum model can support the realization of child-friendly schools, promote equality in education, and empower children with special needs to reach their potential.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Kurikulum inklusif
Sekolah ramah anak
Pendidikan ABK
Model kurikulum inklusif

Pendidikan inklusif merupakan isu global yang bertujuan menjamin akses pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Di Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti akses yang terbatas, stigma sosial, dan minimnya sarana pendukung. Penelitian ini bertujuan mengkaji model kurikulum inklusif dalam membangun lingkungan belajar ramah anak. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian dilakukan melalui studi pustaka dan observasi terhadap fenomena nyata terkait pendidikan inklusif. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi untuk merumuskan kurikulum sekolah inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kurikulum harus didasarkan pada asesmen individual, didukung kolaborasi guru, dan dimodifikasi sesuai kebutuhan siswa. Pembelajaran dilakukan melalui program belajar individual dan evaluasi yang sesuai. Kompetensi guru, dukungan orang tua, dan fasilitas yang memadai menjadi faktor pendukung utama. Kesimpulannya, model kurikulum inklusif mampu mendukung terwujudnya sekolah ramah anak, mendorong kesetaraan pendidikan, dan memberdayakan anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensinya.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif telah menjadi perhatian global, seiring dengan komitmen internasional untuk memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Di Indonesia, hak untuk memperoleh pendidikan dijamin secara konstitusional dan mencakup seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk mereka yang mengalami hambatan fisik, mental, atau sosial. Meski demikian, kondisi di lapangan masih menunjukkan adanya ketimpangan yang nyata. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2023 mengungkapkan bahwa dari sekitar 1,6 juta ABK hanya sekitar 30% yang mampu mengenyam pendidikan diinstitusi formal. (Habibah et al., 2025) Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan yang besar dalam upaya memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Mengacu pada Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945, telah disebutkan bahwa “*setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan*”. Ketentuan ini menegaskan kewajiban negara dalam menyediakan layanan pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat. Selain itu, dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 5 Ayat 1, dijelaskan pula bahwa “*setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas*”. Kedua regulasi ini menegaskan bahwa individu dengan hambatan fisik, emosional, mental, intelektual, maupun sosial memiliki hak untuk memperoleh pendidikan khusus (Gustaman et al., 2025). Dengan demikian, anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) telah dijamin haknya untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak lainnya. Namun sangat disayangkan, dimasyarakat masih terdapat pandangan negatif terhadap ABK, di mana diskriminasi terhadap mereka masih sering terjadi.

Pelaksanaan sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia masih jauh dari kata optimal. Praktik diskriminatif masih sering terjadi, di mana sebagian besar ABK tidak disatukan dengan siswa reguler, melainkan diarahkan untuk menempuh pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB). Padahal, SLB belum tentu mampu memberikan pengembangan potensi secara menyeluruh bagi ABK, dan justru dapat membatasi kesempatan mereka untuk berinteraksi serta berkomunikasi dengan anak-anak lain. Situasi ini berisiko membuat ABK terpinggirkan dari kehidupan sosial, sementara pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan kebutuhan mereka pun masih rendah (Gustaman et al., 2025). Proses pembelajaran merupakan kegiatan transfer pengetahuan yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya setiap pendidik perlu menggunakan model pembelajaran yang tepat agar penyampaian materi dapat berlangsung efektif, terarah, dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. (M. Misbah, 2023) Pendidikan inklusif hadir sebagai alternatif yang menawarkan pendekatan pendidikan yang setara dan terbuka bagi semua kalangan, selaras dengan prinsip *education for all*. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sistem pendidikan yang diterapkan, yang tercermin melalui kebijakan pemerintah dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan.

Topik inklusif dalam dunia pendidikan telah banyak dibahas, baik dalam tataran teoritis maupun praktiknya. Namun, implementasinya di lapangan kerap menghadapi tantangan serius, seperti kurangnya tenaga pendidik yang kompeten, terbatasnya pelatihan profesional untuk guru, serta minimnya fasilitas penunjang dan dukungan kebijakan dari pihak sekolah. Banyak pendidik masih menerapkan metode konvensional yang tidak mampu menyesuaikan dengan keragaman kebutuhan belajar siswa. Padahal, guru memiliki tanggung jawab penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang adil dan setara bagi seluruh peserta didik (Tri & Saptadi, 2025). Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang inovatif dan pemanfaatan teknologi secara kreatif dalam proses pembelajaran, guna menjamin bahwa setiap siswa merasa dihargai, mendapatkan dukungan yang tepat, dan mampu mengembangkan potensi serta meraih prestasi secara optimal.

Penelitian Nur Berlian pada tahun 2011 menunjukkan bahwa keterbatasan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan program wajib belajar di Indonesia. Berbagai studi juga menegaskan bahwa akses pendidikan yang tidak merata, kurangnya tenaga pendidik yang kompeten dalam pendidikan inklusif, serta minimnya sarana dan prasarana yang ramah difabel masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Meskipun pendidikan inklusif telah digagas sebagai solusi untuk memperluas layanan pendidikan yang setara dan menyeluruh, penelitian yang ada umumnya masih berfokus pada aspek kebijakan dan ketersediaan fasilitas. Sementara itu, kajian yang menelaah secara mendalam praktik pendidikan inklusif di tingkat sekolah, khususnya terkait strategi guru dalam mengelola pembelajaran adaptif bagi anak berkebutuhan khusus, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang berfokus pada implementasi nyata pendidikan inklusif dari perspektif pelaku di lapangan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan bagi semua melalui implementasi sekolah ramah anak.

Melalui konsep pendidikan inklusif, setiap anak terlepas dari kondisi fisik, mental, atau sosialnya diberikan peluang untuk belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini bisa dilakukan baik disekolah inklusi maupun disekolah umum yang dilengkapi dengan sarana dan dukungan yang memadai. Model pendekatan ini bukan hanya memperkuat pelaksanaan pendidikan ramah anak, tetapi juga berfungsi sebagai upaya konkret dalam menjamin hak semua anak terhadap pendidikan yang layak. Dengan semakin luasnya penerapan model pendidikan inklusif, diharapkan program wajib belajar akan lebih berhasil dicapai. Selain itu, hal ini juga menjadi langkah strategis menuju sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif, yang mencerminkan masyarakat yang menghargai kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warganya.

2. METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model kurikulum pada sekolah inklusi guna membangun lingkungan belajar yang ramah anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran dan analisis mendalam pendidikan inklusif pada anak berkebutuhan khusus. Sumber data diperoleh dari buku, jurnal dan pengamatan langsung peneliti dilapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menelaah jurnal, artikel ilmiah. Peneliti juga mengamati fenomena nyata yang terjadi di masyarakat terkait pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*), yaitu menginterpretasikan data teks yang terkumpul untuk ditarik model kurikulum pada sekolah inklusi untuk membentuk sekolah ramah anak. Proses ini mencakup pendidikan inklusif, faktor pendorong sekolah ramah anak, strategi membentuk sekolah ramah anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang mengalami keterbatasan baik dari segi intelektual, sosial, emosi dan fisik dari apa yang dianggap normal. Menurut Kosasih, anak berkebutuhan khusus (*special needs children*) adalah anak yang mengalami gangguan (*retarded*) atau anak yang lambat (*slow*) yang tidak pernah berhasil disekolah seperti anak pada umumnya. Menurut WHO (*World Health Organization*) definisi untuk menyebut anak berkebutuhan khusus memiliki banyak istilah yang digunakan (Wijaya, 2019), seperti:

- a. *Disability*, anak yang memiliki keterbatasan dalam menampilkan aktivitas sesuai aturan pada umumnya.
- b. *Impairment*, yaitu kondisi psikologis, struktur anatomi dan fungsinya yang tidak normal seperti manusia pada umumnya.
- c. *Handicap*, yaitu kondisi keterbatasan yang dapat menghambat pemenuhan peran yang normal seperti manusia pada umumnya.

Sebelum menentukan kriteria anak tersebut masuk kriteria Anak Berkebutuhan Khusus perlu diadakan Asesmen awal yang dilakukan oleh guru atau psikolog. Guru wajib melakukan asesmen komprehensif terhadap setiap anak berkebutuhan khusus sejak awal mengikuti pembelajaran di sekolah inklusif. Asesmen ini bertujuan untuk menghimpun informasi selengkap-lengkapnyanya mengenai kondisi individu, baik kekuatan maupun kelemahannya, guna menentukan strategi pembelajaran dan layanan yang sesuai. Menurut Deby Indriani Rahmawan, asesmen tidak hanya dilakukan oleh guru, tetapi juga melibatkan pihak lain seperti psikolog dan guru pendamping khusus (GPK) agar hasilnya objektif. Asesmen dilaksanakan secara berkelanjutan melalui beberapa tahap, yaitu *Baseline Assessment* (mengetahui kemampuan awal anak), *Progress Assessment* (memantau perkembangan selama proses belajar), *Specific Assessment* (menggali kebutuhan tertentu anak), *Final Assessment* (menilai ketercapaian tujuan belajar), dan *Follow-Up Assessment* (menentukan tindak lanjut pembelajaran). Hasil asesmen digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program belajar individual (*Individualized Education Program/IEP*) serta modifikasi kurikulum agar sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan karakteristik masing-masing anak. (Rahmawan, 2020) Proses asesmen yang komprehensif dan akurat terhadap setiap anak berkebutuhan khusus bertujuan mengetahui kesulitan dan kelebihanannya, sehingga guru dapat memberikan penanganan dan pelayanan belajar yang sesuai dengan kebutuhan individual masing-masing anak.

Menurut Heward, anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah individu yang memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dari anak-anak pada umumnya, meskipun tidak selalu berkaitan dengan hambatan secara mental, emosional, atau fisik. Sementara itu, berdasarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2013, anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai anak yang memiliki keterbatasan atau keistimewaan dalam aspek fisik, intelektual, sosial, maupun emosional yang berdampak nyata terhadap proses tumbuh kembangnya jika dibandingkan dengan anak seusianya (Saputri et al., 2023).

Dalam konteks pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, istilah "penyimpangan" secara jelas merujuk pada anak-anak yang menunjukkan perbedaan signifikan dari kondisi anak-anak pada umumnya, baik dari segi fisik, mental, maupun perilaku sosial. Anak-anak ini memiliki karakteristik yang tidak sesuai dengan rata-rata, karena mengalami kendala dalam hal kemampuan berpikir, pendengaran, penglihatan, interaksi sosial, maupun gerak motorik. Berdasarkan pengertian tersebut, anak berkebutuhan khusus mencakup berbagai kondisi, seperti *Disleksia learning* (kesulitan dalam belajar membaca), ADHD (gangguan konsentrasi), *Autisme* (gangguan perkembangan saraf), *Speech Delay* (lambat dalam kemampuan berbicara), *Down Syndrome* (keterlambatan perkembangan fisik dan mental), Tuna Grahita (tingkat

kecerdasan di bawah rata-rata), serta Tuna Rungu (gangguan pada pendengaran) (Saputri et al., 2023).

Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki perbedaan signifikan dari anak-anak pada umumnya dalam aspek fisik, mental, maupun perilaku sosial. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh gangguan dalam kemampuan berpikir, berkomunikasi, bergerak, maupun berinteraksi sosial. Kategori anak berkebutuhan khusus mencakup berbagai kondisi seperti disleksia, ADHD, *autisme*, *speech delay*, *down syndrome*, tuna grahita, dan tuna rungu, yang semuanya memerlukan pendekatan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individual mereka.

Menimbang hal demikian, berbagai kondisi yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus, baik dalam aspek fisik, mental, emosional, maupun sosial, tidak mengurangi hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak. Justru, keberagaman kebutuhan tersebut semakin menegaskan pentingnya penyediaan layanan pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berpihak pada setiap anak. Pendidikan menjadi sarana utama bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi, membangun kemandirian, serta memperoleh kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus mampu menjawab kebutuhan mereka dengan pendekatan yang holistik dan manusiawi. Hal tersebut dapat dipenuhi melalui kurikulum inklusi dan usaha tenaga pendidik dalam membangun sekolah ramah anak (SRA).

Salah satu tujuan utama pendidikan inklusif adalah untuk mengurangi hambatan dalam proses tumbuh kembang anak dan memperluas peluang mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari secara wajar. Selain itu, pendidikan inklusif juga berperan dalam mencegah kondisi perkembangan anak yang semakin memburuk serta menghindari munculnya keterbatasan lain yang dapat timbul akibat ketidakmampuan utama yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya, pendekatan individual perlu diterapkan guna mengatasi berbagai tantangan, seperti rendahnya semangat belajar dan keterbatasan ekonomi peserta didik. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kerja sama erat antara guru dan orang tua (Saputra, 2018).

Menurut peneliti pendidikan inklusif bertujuan menjamin hak semua anak, termasuk ABK, untuk memperoleh akses belajar yang setara. Meski dijamin konstitusi, pelaksanaannya di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, seperti diskriminasi dan keterbatasan layanan. Hanya sebagian kecil ABK yang terlayani di pendidikan formal. Sekolah Luar Biasa belum sepenuhnya mendukung pengembangan sosial dan akademik mereka. Pendidikan inklusif menjadi solusi untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, ramah, dan merata bagi semua anak.

Melihat kondisi yang ada, pelaksanaan pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) masih memerlukan perhatian dan layanan yang lebih optimal. Dukungan yang dibutuhkan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga emosional, yang mencakup empati, kepedulian, dan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab ini seharusnya tidak hanya dibebankan kepada orang tua, melainkan juga melibatkan peran aktif masyarakat dan pemerintah (Hanifah et al., 2022). Keterlibatan semua pihak tersebut sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara holistik.

Dalam konteks pendidikan inklusif, kompetensi guru dan Guru Pendamping Khusus (GPK) memiliki peran yang sangat menentukan terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Guru dituntut memiliki kompetensi pedagogik dan pengetahuan yang memadai tentang penyelenggaraan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan individual siswa. Sementara itu, GPK berperan sebagai fasilitator dan mediator antara siswa berkebutuhan khusus, guru kelas, dan teman sebaya, guna menciptakan suasana belajar yang positif, adaptif, dan inklusif. GPK harus mampu menyusun dan melaksanakan *Program Pembelajaran Individual* (PPI), melakukan asesmen berkelanjutan, serta menyesuaikan strategi dan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kemampuan setiap

siswa.(Sari Rudiyati, 2005) Selain keterampilan teknis, GPK juga perlu memiliki empati, kemampuan komunikasi efektif, serta menjadi teladan dalam perilaku sosial yang positif. Kompetensi tersebut tidak hanya membantu siswa berkebutuhan khusus mencapai potensi maksimalnya, tetapi juga berdampak pada peningkatan kapasitas guru dalam menghadapi keberagaman kebutuhan siswa di kelas. Dengan demikian, sinergi antara guru dan GPK menjadi faktor kunci dalam mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, suportif, dan menghargai perbedaan sebagai kekuatan pendidikan.

3.1. Model Kurikulum Inklusif

a. Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan bentuk pendidikan yang mengedepankan prinsip kesetaraan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta nilai-nilai kemanusiaan, yang diimplementasikan dalam konsep pendidikan yang menjangkau seluruh kalangan. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai langkah untuk mendorong terlaksananya sistem pendidikan inklusif secara menyeluruh. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kebijakan tambahan yang lebih spesifik dan kontekstual guna menjawab berbagai permasalahan yang muncul di lapangan (Astawa, 2021). Berikut perencanaan pembelajaran inklusif yang dapat diterapkan di sekolah, yaitu:

1) Perencanaan Pembelajaran Inklusif

Perencanaan pembelajaran dalam pendidikan inklusif disusun berdasarkan hasil asesmen terhadap peserta didik. Asesmen merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan dan kebutuhan siswa, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan penempatan serta program pendidikan yang sesuai. Melalui asesmen, guru dapat merancang pembelajaran yang selaras dengan karakteristik dan kemampuan individu siswa berkebutuhan khusus (ABK). Tanpa data asesmen, perencanaan yang disusun tidak akan mampu menjawab kebutuhan spesifik siswa ABK, dan kurikulum pun tidak dapat diterapkan secara efektif. Seperti yang disampaikan oleh Sunaryo, proses asesmen menjadi landasan utama dalam penyusunan rencana pembelajaran. Asesmen ini dilakukan melalui kerja kolaboratif antara Guru Pendidikan Khusus (GPK), guru mata pelajaran, psikolog, bahkan dokter spesialis. Setelah informasi terkumpul, GPK bersama guru mata pelajaran menyusun modul ajar yang akan digunakan dalam proses belajar siswa ABK (Saputra, 2018).

Kurikulum yang diterapkan tetap mengacu pada kurikulum reguler yang digunakan di sekolah umum, namun dimodifikasi sesuai kebutuhan siswa. Modifikasi tersebut mencakup penyederhanaan pada aspek kompetensi dasar, indikator, materi ajar, bentuk penilaian, dan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP). Hal ini sejalan dengan pedoman pelaksanaan pendidikan inklusif, yang menyatakan bahwa meskipun kurikulum yang digunakan bersifat umum, penyesuaian tetap diperlukan karena beragamnya hambatan yang dimiliki oleh siswa berkebutuhan khusus mulai dari ringan hingga berat. Oleh karena itu, modifikasi dilakukan oleh tim pengembang kurikulum sekolah yang terdiri atas kepala sekolah, guru kelas, dan guru mata pelajaran, agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan sesuai dengan kondisi setiap peserta didik.

2) Pelaksanaan Pembelajaran Inklusif

Mengajar anak-anak dengan kebutuhan khusus agar dapat fokus dalam proses pembelajaran merupakan tantangan tersendiri bagi pendidik. Salah satu pendekatan yang efektif untuk mengatasi permasalahan konsentrasi adalah melalui strategi pembelajaran berbasis permainan. Pendekatan ini sangat sesuai bagi anak berkebutuhan khusus karena menciptakan

suasana belajar yang menarik dan menyenangkan. Melalui kegiatan bermain, anak dapat mengembangkan berbagai keterampilan secara alami, termasuk kemampuan sosial, kognitif, motorik, dan bahasa, dalam suasana yang menyenangkan dan tidak menekan (Mansur, 2018).

Dalam pelaksanaan pembelajaran bagi siswa inklusif, diterapkan sistem kelas Pull Out, yaitu apabila siswa berkebutuhan khusus (ABK) masih mampu mengikuti pelajaran di kelas reguler, maka mereka akan belajar bersama teman-temannya yang non ABK. Namun, jika siswa ABK mengalami kesulitan dalam mengikuti proses belajar di kelas reguler, maka mereka akan dipindahkan ke ruang pembelajaran khusus yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Proses pembelajaran untuk ABK ini menggunakan Program Pembelajaran Individual (PPI) yang disusun berdasarkan kurikulum yang telah dimodifikasi sesuai dengan kemampuan dan karakteristik masing-masing siswa (Saputra, 2018).

3) Evaluasi Pembelajaran Inklusif

Evaluasi dalam pendidikan inklusif merupakan suatu proses pengumpulan informasi yang berguna untuk menilai pencapaian tujuan, rancangan program, pelaksanaan, serta dampak dari suatu kebijakan atau praktik (Nadrah, 2023). Proses ini berperan penting dalam pengambilan keputusan, memastikan akuntabilitas, dan memperdalam pemahaman terhadap sistem layanan pendidikan yang melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan teman sebayanya di sekolah reguler yang berada di lingkungan tempat tinggal mereka.

Evaluasi dalam pembelajaran inklusif dilaksanakan melalui berbagai bentuk seperti Evaluasi Sumatif, evaluasi formatif, asesmen sumatif akhir semester (ASAS), asesmen formatif akhir tahun (ASAT), serta tugas-tugas lainnya. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mencapai indikator atau standar pembelajaran yang ditetapkan. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa siswa belum memenuhi standar, maka guru akan memberikan kegiatan remedial berupa tugas tambahan yang relevan dengan materi tersebut. Soal-soal ujian yang diberikan kepada siswa berkebutuhan khusus (ABK) dirancang berbeda dari soal siswa reguler (Saputra, 2018). Soal-soal ini dibuat oleh guru pendidikan khusus (GPK) yang bekerja sama dengan guru mata pelajaran, dan telah disesuaikan dengan kemampuan belajar masing-masing siswa ABK.

Bagi siswa ABK yang dinilai mampu mengikuti standar penilaian yang sama dengan siswa reguler, mereka tetap mengikuti tes yang serupa. Namun, bentuk dan pendekatannya telah dimodifikasi agar sesuai dengan kapasitas belajar mereka. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan metode pembelajaran yang telah digunakan oleh guru di kelas. Atau menggunakan system reduksi soal, Dimana soal yang diterima siswa tingkat kesulitannya diturunkan sesuai kemampuan masing-masing peserta didik ABK. Hasil evaluasi siswa ABK dilaporkan dalam format yang sama seperti siswa reguler, baik dari segi bentuk maupun struktur laporan. Perbedaannya terletak pada standar Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) yang lebih rendah bagi siswa ABK. Selain nilai kuantitatif, laporan hasil belajar juga dilengkapi dengan penjelasan naratif yang menggambarkan perkembangan akademik siswa ABK. Narasi ini menjadi bagian dari laporan akhir atau rapor siswa berkebutuhan khusus.

Dalam pandangan Puspita (2023), evaluasi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) harus menekankan penilaian yang berpusat pada kekuatan, minat, dan kebutuhan individual anak. Evaluasi tidak hanya berupa tes tertulis atau angka, melainkan juga mencakup observasi perilaku, keterampilan sosial, serta kemampuan beradaptasi anak dalam lingkungan belajar. Proses evaluasi ini dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai pendekatan seperti evaluasi formatif, sumatif, diagnostik, portofolio, dan otentik. Melalui pendekatan tersebut, guru

dapat memperoleh pemahaman komprehensif tentang perkembangan anak dari waktu ke waktu. Puspita menegaskan bahwa evaluasi yang bersifat naratif perlu diterapkan dalam pendidikan inklusif agar laporan hasil belajar tidak sekadar menunjukkan pencapaian akademik, tetapi juga menggambarkan kemajuan emosional, sosial, dan keterampilan hidup anak secara menyeluruh. (Puspita, 2023) Laporan naratif ini memungkinkan guru untuk menjelaskan secara deskriptif perkembangan individu anak, perubahan perilaku, serta bentuk dukungan yang diperlukan dalam pembelajaran berikutnya. Evaluasi adaptif semacam ini tidak hanya membantu guru dalam menentukan strategi pembelajaran yang lebih sesuai, tetapi juga menjadi sarana komunikasi penting antara guru, orang tua, dan guru pendamping khusus dalam mendukung tumbuh kembang anak. Dengan demikian, evaluasi dan pelaporan naratif dalam pendidikan inklusif berperan penting dalam memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, mendapatkan kesempatan belajar yang adil dan bermakna sesuai potensinya.

4) Faktor Pendukung dan penghambat Pembelajaran Inklusif

Dukungan terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah penyelenggara diwujudkan melalui penerbitan surat keputusan resmi yang menetapkan sekolah tersebut sebagai institusi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Salah satu bentuk dukungan lainnya adalah pemberian pelatihan bagi Guru Pendamping Khusus (GPK), termasuk mengikutsertakan mereka dalam berbagai kegiatan pelatihan dan lokakarya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman mereka dalam praktik pendidikan inklusif (Saputra, 2018).

Di sisi lain, penyediaan fasilitas penunjang seperti ruang khusus sangat penting, terutama untuk menangani kondisi ABK yang membutuhkan ketenangan atau penanganan khusus, baik dari GPK maupun psikolog. Selain itu, kelengkapan media pembelajaran dan sarana pendukung lainnya juga menjadi perhatian utama agar proses pembelajaran bagi ABK dapat berlangsung secara optimal. Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan inklusif di lingkungan sekolah juga dibutuhkan, agar seluruh warga sekolah, termasuk guru, staf, dan siswa reguler, dapat menerima keberadaan ABK dan menciptakan suasana yang inklusif serta ramah terhadap mereka.

Peran orang tua dalam mendukung pendidikan inklusif juga sangat penting, yang ditunjukkan melalui kemitraan positif mereka dengan pihak sekolah demi menunjang proses belajar siswa ABK. Namun demikian, tantangan terbesar justru sering kali berasal dari kondisi ABK itu sendiri. Hambatan yang mereka alami baik dalam aspek kognitif, emosional, maupun sosial kerap menjadikan proses pembelajaran kurang kondusif. Kesulitan dalam beradaptasi dan bersosialisasi di lingkungan sekolah dapat memunculkan berbagai kendala yang menghambat kelancaran kegiatan belajar mengajar.

b. Kelebihan dan Manfaat Pendidikan Inklusif

Pentingnya pengembangan pendidikan inklusif terus ditekankan karena memberikan berbagai manfaat yang signifikan. Menurut Staub dan Peck (1994/1995), terdapat lima keuntungan utama dari penerapan program inklusi, yaitu (Astawa, 2021):

- 1) Melalui interaksi yang rutin dengan anak berkebutuhan khusus (ABK), siswa non-ABK mengaku tidak lagi merasa takut atau canggung terhadap ABK.
- 2) Mereka menunjukkan peningkatan sikap toleransi setelah memahami perbedaan kebutuhan individu pada teman-teman mereka yang berkebutuhan khusus.
- 3) Banyak siswa nonABK merasakan peningkatan kepercayaan diri (*self-esteem*), yang ditunjukkan melalui peningkatan status sosial mereka di lingkungan kelas maupun sekolah.

- 4) Pendidikan inklusif turut membentuk perkembangan moral dan penguatan nilai-nilai etika pada siswa non ABK.
- 5) Anak-anak non ABK yang menerima keberadaan ABK menyatakan bahwa mereka merasa senang dan bersyukur dapat menjalin persahabatan dengan teman-teman ABK.

Dengan demikian, para orang tua yang anaknya tidak termasuk dalam kategori ABK tidak perlu merasa khawatir terhadap potensi dari sistem pendidikan inklusif. Justru, keberadaan program ini membawa dampak positif bagi anak-anak mereka, baik dalam hal sosial, emosional, maupun perkembangan karakter secara keseluruhan. Menurut Anisa, menyebutkan ada beberapa manfaat dari pendidikan inklusi (Mustika et al., 2023), yaitu:

- 1) Bagi Peserta Didik

Anak-anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, memperoleh kesempatan untuk mengikuti pembelajaran yang setara dengan teman-teman sebayanya. Melalui pendekatan ini, mereka dapat mengembangkan potensi terbaik yang dimiliki dalam bidang tertentu dengan dukungan dari guru dan tenaga pendidik lainnya.

- 2) Bagi Lembaga Pendidikan

Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif juga memperoleh keuntungan, terutama ketika peserta didiknya mampu mencapai prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Capaian tersebut tidak hanya meningkatkan reputasi sekolah di mata publik, tetapi juga membuka peluang untuk mendapat sorotan positif dari berbagai media.

- 3) Bagi Masyarakat dan Bangsa

Dampak jangka panjang dari pendidikan inklusif dapat dirasakan oleh masyarakat dan negara melalui hadirnya generasi muda yang unggul dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Pendidikan inklusif juga membantu membentuk lingkungan sosial yang lebih terbuka, serta mengubah pandangan negatif terhadap anak-anak berkebutuhan khusus menjadi lebih positif dan inklusif.

3.2. Konsep Lingkungan Belajar Ramah Anak

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 mengenai kebijakan Sekolah Ramah Anak, disebutkan bahwa konsep Sekolah Ramah Anak (SRA) mencakup seluruh bentuk satuan pendidikan, baik yang bersifat formal, nonformal, maupun informal. Sekolah yang menerapkan prinsip ini dituntut untuk menciptakan lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, sekolah juga wajib menjamin dan memenuhi hak-hak anak serta memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun perlakuan yang tidak pantas.

Sekolah Ramah Anak juga mendorong keterlibatan aktif anak dalam berbagai aspek pendidikan, termasuk dalam proses perumusan kebijakan, pelaksanaan pembelajaran, sistem pengawasan, hingga penyampaian keluhan atau pengaduan terkait pemenuhan hak anak di lingkungan pendidikan (Wuryandani et al., 2018). Selain itu, seorang guru diharapkan mampu menjadi pribadi yang menyenangkan bagi peserta didik, yaitu dengan menunjukkan sikap yang lembut, sabar, penuh kasih sayang, disiplin terhadap waktu, serta memiliki keikhlasan dan ketulusan dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. (Nurfuadi et al., 2022) Hal ini menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga berperang penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh.

Untuk menilai kualitas Sekolah Ramah Anak (SRA), perlu dilakukan evaluasi dari berbagai aspek penting. Di antaranya adalah: (Wuryandani et al., 2018)

- a. Proporsi antara siswa laki-laki dan perempuan yang diterima di sekolah,
- b. Jumlah dan kualifikasi guru yang mampu memenuhi hak-hak siswa,
- c. Sistem pembelajaran yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan peserta didik,
- d. Terciptanya suasana belajar yang nyaman dan aman,
- e. Sikap guru yang menghargai hak serta kebutuhan anak,
- f. Penerapan metode pembelajaran yang menempatkan anak sebagai pusat proses belajar,
- g. Pola interaksi dalam kelas serta sistem manajemen sekolah,
- h. Desain ruang kelas yang menunjang kegiatan pembelajaran aktif,
- i. Ketersediaan lingkungan fisik, fasilitas, dan layanan pendukung yang responsif terhadap kebutuhan seluruh anak, dan
- j. Penerapan proses belajar-mengajar yang bebas dari diskriminasi berdasarkan gender, suku, maupun latar belakang sosial.

Integrasi prinsip Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam kurikulum dan kegiatan sekolah menjadi langkah strategis dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan menghargai hak-hak anak. Penelitian Okvi Maharani, Eko Handoyo, dan Edi Waluyo (2025) menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam seperti rahmah (kasih sayang), ‘adl (keadilan), dan karāmah insānīyah (kemuliaan manusia) diinternalisasikan secara menyeluruh dalam kurikulum, budaya sekolah, serta kegiatan pembelajaran. (Maharani et al., 2025) Prinsip-prinsip SRA seperti keamanan, kebersihan, dan penghargaan terhadap hak anak diterapkan melalui pembiasaan harian seperti salam, sapa, salim, doa bersama, serta pelaksanaan shalat berjamaah. Selain itu, kegiatan sosial-keagamaan seperti Jumat Berbagi dan bakti sosial menumbuhkan empati sosial serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Sekolah juga mengimplementasikan kebijakan anti-kekerasan dan anti-bullying, menyediakan mekanisme pelaporan yang aman bagi siswa, serta menjalin kerja sama dengan instansi seperti DP3AKB dalam sosialisasi perlindungan anak. Integrasi tersebut menjadikan nilai-nilai Islam tidak hanya diajarkan secara konseptual, tetapi juga dihidupkan dalam rutinitas dan kebijakan sekolah, sehingga tercipta suasana belajar yang positif, bersih, aman, dan ramah anak. Implikasinya, penerapan SRA berbasis nilai keislaman ini tidak hanya memperkuat perlindungan anak di sekolah, tetapi juga membentuk karakter peserta didik yang berakhlak, peduli, dan bertanggung jawab sosial.

Sekolah ramah anak juga memiliki peran strategis dalam mencegah serta menangani kasus perundungan, khususnya pada anak usia dini dan anak berkebutuhan khusus. Lingkungan yang kondusif, penguatan pendidikan karakter dan nilai-nilai moral, keterlibatan aktif orang tua dan komunitas, serta penyediaan program untuk pengembangan keterampilan sosial dan emosional, menjadi kunci dalam menciptakan suasana belajar yang aman dan memberdayakan. Keberhasilan implementasi konsep sekolah ramah anak sangat bergantung pada komitmen kolektif seluruh pihak, mulai dari guru, orang tua, siswa, hingga pemerintah. Melalui kolaborasi yang erat, sistem pendidikan dapat dibangun untuk melindungi anak dari tindakan perundungan serta mendukung mereka tumbuh sebagai pribadi yang sehat dan berakhlak (Haniya et al., 2024). Pelaksanaan program sekolah ramah anak dapat berjalan secara optimal apabila didukung oleh kerja sama yang solid antara kepala sekolah, pendidik, orang tua, dan pihak eksternal. Sinergi yang terbangun melalui komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan suportif akan mendorong perkembangan anak secara menyeluruh, baik dalam aspek akademik maupun emosional.

Adapun Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komunitas merupakan elemen penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik dan berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ozalan Velayati, Maisyaroh, Sultoni, dan Raden Bambang Sumarsono (2023), kemitraan ini perlu dibangun atas dasar kesetaraan, saling percaya, dan tanggung jawab bersama antara pihak sekolah, keluarga, serta masyarakat. Sekolah

berperan sebagai pusat pendidikan formal, sementara keluarga dan komunitas berfungsi sebagai lingkungan pendukung yang memperkuat nilai-nilai moral, sosial, dan religius anak. Bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui forum komunikasi seperti pertemuan rutin sekolah dan orang tua, pembentukan komite sekolah dan paguyuban kelas, serta kegiatan parenting dan sosialisasi pendidikan karakter. Selain itu, kegiatan berbasis komunitas seperti kerja bakti, bakti sosial, dan outing class turut mempererat hubungan emosional antara sekolah, siswa, dan masyarakat sekitar. (Velayati et al., 2021) Melalui kolaborasi ini, orang tua tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam proses pendidikan, sehingga tercipta sinergi yang mendukung perkembangan akademik dan kepribadian anak secara berkelanjutan. Implikasinya, kemitraan sekolah, orang tua, dan komunitas mampu memperkuat budaya partisipatif, komunikasi terbuka, serta tanggung jawab kolektif dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, ramah anak, dan berkarakter.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model kurikulum inklusif berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak, khususnya bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Melalui pendekatan asesmen individual, modifikasi kurikulum, dan dukungan pembelajaran yang tepat, sekolah dapat memenuhi hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas. Pembelajaran yang disesuaikan tidak hanya mengakomodasi kebutuhan akademik, tetapi juga mendukung perkembangan sosial, emosional, dan moral anak secara menyeluruh. Temuan ini sekaligus menjawab tujuan penelitian bahwa kurikulum inklusif dapat menjadi strategi efektif dalam membangun sistem pendidikan yang adil dan adaptif. Implementasi pendidikan inklusif juga menuntut sinergi antara guru, orang tua, serta dukungan kebijakan pemerintah yang berkelanjutan. Kedepan, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada pengembangan model pelatihan guru dan evaluasi efektivitas program inklusi secara kuantitatif, agar penerapannya semakin optimal dalam berbagai konteks satuan pendidikan.

REFERENCES

- Astawa, I. N. T. (2021). Pendidikan Inklusi dalam Memajukan Pendidikan Nasional Oleh I Nyoman Temon Astawa. *Jurnal Pendidikan Hindu*, 8(1), 65–76. <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/GW>
- Faikoturrohma, E., Pradana, P. H., & Suwargono, T. (2025). Implementasi Media Edukasi Berbasis Aplikasi Solite Kids untuk Meningkatkan Keterampilan Critical Thinking Anak Usia Dini. *Cokroaminoto Journal of Primary Education*, 8, 646–657.
- Gustaman, R. F., Gandi, A., Ratnaningsih, N., Siliwangi, U., Artikel, I., Inklusif, P., & Education, J. (2025). Implementasi pendidikan inklusif dalam mewujudkan sekolah ramah anak. *Education and Development*, 13(1), 660–666.
- Hanifah, D. S., Haer, A. B., Widuri, S., & Santoso, M. B. (2022). Tantangan Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Dalam Menjalani Pendidikan Inklusi Di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 473. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.37833>
- Haniya, Miftakhul Jannah, Y. M. L. M. (2024). Pendidikan Sekolah Ramah Anak dalam Mencegah dan Menangani Perundungan Pada Anak Usia Dini. *AR-RIAYAH: Jurnal Pendidikan Dasar*, 8(1), 63. <https://doi.org/10.29240/jpd.v8i1.9772>
- M. Misbah, K. F. (2023). Studi Analitis Model Pembelajaran PAI Abad 21 berbasis Multiple Intelligences. *Studi analitis model pembelajaran pai abad 21 berbasis multiple intelligences*,

-
- 10(1), 310–324. <https://bnr.bg/post/101787017/bsp-za-bulgaria-e-pod-nomer-1-v-buletinata-za-vota-gerb-s-nomer-2-pp-db-s-nomer-12>
- Maharani, O., Handoyo, E., Waluyo, E., & Semarang, N. (2025). Analisis Implementasi Sekolah Ramah Anak Berbasis Islam Terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak Analysis of the Implementation of Schools on the Fulfillment of Children ' s Rights and. *Action Research Journal Indonesia (ARJI)* |, 7(2), 598.
- Mansur, H. (2018). Implementasi Pendidikan Inklusi. *Pustaka Senja*, 4(2), 1–139.
- Mustika, D., Yurika Irsanti, A., Setiyawati, E., Yunita, F., Fitri, N., Zulkarnaini, P., Studi, P., Guru, P., & Dasar, S. (2023). Menelaah Manfaat Pendidikan Inklusi: Mewujudkan Kesetaraan bagi Seluruh Anak. *Jurnalpost.Com*, 1(4), 41–50. https://jurnalpost.com/wp-content/uploads/2023/06/Menelaah-Manfaat-Pendidikan-Inklusi_Mewujudkan-Kesetaraan-anak.pdf
- Nadrah, N. (2023). Model Evaluasi Pendidikan Inklusif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1737–1745. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/485>
- Nurfuadi, N., Khasanah, E. U., & Fian, K. (2022). Nilai-Nilai Kepribadian Guru Dalam Pendidikan Islam. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 43–55. <https://doi.org/10.21274/taalum.2022.10.1.43-55>
- Puspita, B. (2023). Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti Berkebutuhan Khusus. *Jurnal pendidikan inklusi Citra Bakti*, 2, 1–10. <https://doi.org/10.38048/jpicb.v1i2.3236>
- Rahmawan, D. I. (2020). Analisis Asesmen Pendidikan Inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus. *The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education*, 1(1), 47–62.
- Saputra, A. (2018). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(3), 1–15. <https://doi.org/10.14421/jga.2016.13-01>
- Saputri, M. A., Widiyanti, N., Lestari, S. A., & Hasanah, U. (2023). Ragam Anak Berkebutuhan Khusus. *Childhood Education. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 38–53.
- Sari Rudiayati. (2005). Peran dan Tugas Guru Pendamping Khusus. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 2005, 2203–2209.
- Tri, N., & Saptadi, S. (2025). *Peningkatan Kompetensi Guru dalam Penciptaan Ruang Belajar Inklusif Berbasis Inovasi dan Kreativitas Teknologi di Era Digital*. 5(1), 1–7.
- Velayati, O., Maisyaroh, Sultoni, & Sumarsono, R. B. (2021). Kemitraan Sekolah dan Orang Tua dalam Mewujudkan Karakter Peserta Didik Unggul di SD Laboratorium UM. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang Membangun Karakter Generasi Unggul Untuk Indonesia Emas 2045*, 204, 1–17. <http://conference.um.ac.id/index.php/pses/article/view/9578>
- Wijaya, D. (2019). *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*. Kencana.
- Wuryandani, W., & Senen, A. (2018). Implementasi pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan. Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 86–94.